

KOSMOPOLITANISME KESULTANAN ACEH DARUSSALAM: PUSAT PEREKONOMIAN, KEBUDAYAAN, DAN ILMU PENGETAHUAN

Miswari

IAIN Langsa

miswari@iainlangsa.ac.id

Article:

Received: Agustus, 2024

Accepted: November, 2024

Published: Desember, 2024

© 2024 The Author(s).



This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

Correspondence Address:

miswari@iainlangsa.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memahami perkembangan Kesultanan Aceh Darussalam, mulai dari pembentukannya, kondisi sosial-budaya, hingga faktor-faktor yang memengaruhi kemunduran kerajaan ini. Penelitian ini juga ingin mengungkap peran Kesultanan Aceh dalam membentuk identitas Islam di Nusantara. Penelitian menggunakan metode sejarah dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer dan sekunder, seperti manuskrip, dokumen sejarah, dan kajian akademik sebelumnya. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi dinamika sosial, politik, dan keagamaan di Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda (1607–1636), yang berhasil memperluas wilayah dan menjalin diplomasi global. Aceh dikenal sebagai pusat perdagangan maritim dan pendidikan Islam yang kosmopolit, dengan kontribusi ulama besar seperti Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Al-Sumatrani. Namun, konflik internal, dominasi pedagang, dan intervensi kolonial, terutama oleh Portugis dan Belanda, memicu kemunduran Kesultanan. Ajaran tasawuf filosofis yang berkembang kemudian digantikan oleh pendekatan syariat yang lebih konservatif di bawah pengaruh ulama seperti Nuruddin Ar-Raniri. Meski demikian, Aceh tetap menjadi simbol kebesaran Islam di Nusantara dengan warisan intelektual yang bertahan hingga kini.

Kata kunci : Kesultanan Aceh Darussalam, Sultan Iskandar Muda, tasawuf filosofis, kosmopolitanisme Aceh Darussalam, kolonialisme Belanda.

Abstract: This study aims to understand the development of the Aceh Darussalam Sultanate, from its establishment and socio-cultural conditions to the factors contributing to its decline. It also seeks to uncover the role of the Aceh Sultanate in shaping Islamic identity in the Nusantara. The research employs historical methods with a descriptive-analytical approach. Data were collected from primary and secondary sources, such as manuscripts, historical documents, and previous academic studies. Analysis was conducted to identify the social, political, and religious dynamics within the Aceh Darussalam Sultanate. The Aceh Sultanate reached its peak during the reign of Sultan Iskandar Muda (1607–1636), who successfully expanded its territory and established global diplomatic relations. Aceh was renowned as a center of maritime trade and Islamic education with significant contributions from scholars such as Hamzah Fansuri and Syamsuddin Al-Sumatrani. However, internal conflicts, merchant dominance, and colonial intervention, particularly by the Portuguese and the Dutch, led to the Sultanate's decline. The flourishing philosophical sufism was later replaced by a more conservative Sharia-based approach under the influence of scholars like Nuruddin Ar-Raniri. Despite these challenges, Aceh remains a symbol of Islamic grandeur in the Nusantara, with a lasting intellectual legacy.

Keywords: Aceh Darussalam Sultanate, Sultan Iskandar Muda, philosophical sufism, cosmopolitanism of Aceh Darussalam, Dutch colonialism.

Pendahuluan

Kesultanan Aceh Darussalam merupakan salah satu kekuatan besar yang memainkan peran penting dalam sejarah Nusantara, khususnya pada abad ke-16 hingga abad ke-17. Kesultanan ini lahir dari transformasi kerajaan-kerajaan kecil seperti Kerajaan Lamuri, yang sudah dikenal sejak abad ke-9 sebagai pusat perdagangan dan budaya. Lokasi strategis di Selat Malaka menjadikan Aceh Darussalam bukan hanya sebagai pusat perdagangan, tetapi juga pusat penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara. Dengan perpaduan antara kekuatan militer, diplomasi yang efektif, dan kekayaan budaya, Kesultanan Aceh Darussalam mampu mencapai kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda.

Salah satu keistimewaan Aceh Darussalam adalah kemampuannya mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi, politik, dan agama untuk membangun masyarakat yang kosmopolit. Di masa puncaknya, Aceh menjadi penghubung utama perdagangan antara dunia Timur dan Barat. Kota Kutaraja, ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam, berkembang sebagai pusat aktivitas perdagangan internasional yang melibatkan pedagang dari Timur Tengah, India, Cina, dan Eropa. Kehidupan sosial di Kutaraja mencerminkan keanekaragaman budaya, di mana bahasa Melayu menjadi satu-satunya bahasa yang digunakan sehari-hari. Dalam bidang intelektual, Aceh Darussalam menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan tasawuf, dengan hadirnya ulama-ulama besar seperti Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Al-Sumatrani.

Namun, perjalanan sejarah Kesultanan Aceh Darussalam juga diwarnai oleh dinamika politik yang kompleks. Perebutan kekuasaan, intervensi kaum saudagar, dan ancaman kolonialisme Eropa menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh kesultanan ini. Setelah masa kejayaan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh Darussalam mulai mengalami kemunduran akibat konflik internal dan tekanan eksternal dari Portugis dan Belanda. Meskipun demikian, semangat perlawanan terhadap kolonialisme tetap menjadi ciri khas

masyarakat Aceh, yang tercermin dalam berbagai upaya diplomasi dan perjuangan fisik untuk mempertahankan kedaulatan Aceh Darussalam.

Dengan kekayaan sejarah dan kontribusinya yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, Kesultanan Aceh Darussalam bukan hanya sekadar bagian dari sejarah Nusantara, tetapi juga simbol kekuatan dan identitas Islam di Alam Melayu. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perjalanan Kesultanan Aceh Darussalam, mulai dari latar belakang pendiriannya, kondisi sosial pada masa kejayaan, hingga faktor-faktor yang memengaruhi kemundurannya.

Berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam

Berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam tidak terlepas dari eksistensi Kerajaan Indrapura atau disebut juga Kerajaan Lamuri. Kerajaan tersebut telah eksis sejak abad kesembilan dan menjadi destinasi para pedagang India, Cina, dan Timur Tengah. Letaknya adalah di Lamreh, Aceh Besar. Perubahan struktur geografis muara sungai dan pertikaian dengan Pidie menyebabkan pusat kerajaan dipindahkan ke dekat muara sungai lainnya di Kuta Alam. Kerajaan Lamuri memiliki banyak hasil bumi yang menari pedagang dari Cina, India, dan Arab. Kerajaan tersebut tercatat telah memiliki raja beragama Islam sejak awal abad kelima belas yakni Malik Syamsuddin. Bahkan sebenarnya di Lamuri itulah nisan tertua berinsripsi Islam ditemukan yakni pada tahun 1007 Masehi. Nisan ini lebih tua daripada nisan di Leran, Gresik yang yakni tahun 1082. Sementara nisan Pasai adalah 1297.

Kerajaan Lamuri yang telah berpindah ke Kutaraja menjadi cikal bakal berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam.¹ Ali Mughayat Syah sebagai sultan pertama Aceh Darussalam berhasil menggabungkan neger-negeri di Aceh Besar dan nainnya seperti Daya, Pidie, dan mengusir Portugis di Pasai. Ekspansi Ali Mughayat Syah mencapai Deli. Kemudian Sultan Salahuddin menggantikan Ali Mughayat Syah. Sultan Alaudin Riayat Syah Al-Kahar sebagai sultan ketiga berhasil mengalahkan Aru yang dibantu oleh Johor. Sultan Alaudin Riayat Syah Al-Kahar juga coba menyerang Malaka yang menjadi pusat konsentrasi musuh bebuyutan Aceh Darussalam yakni Portugis.

Setelah itu, para sultan naik dan turun dalam waktu yang singkat. Terdapat kepentingan besar dalam kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Para saudagar hanya menginginkan sultan yang bisa bekerjasama dengan mudah. Pembunuhan sultan dan berbagai intrik politik kerap terjadi hingga Sultan Alaudin Riayat Syah yang menjadi sultan Aceh Darussalam kesepuluh naik tahta. Dia adalah keturunan dari dinasti awal sebelum Kesultanan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah. Sultan Alaudin Riayat Syah merupakan putra dari Firman Syah bin Muzaffar Syah, bin Syamsu Syah bin Munawar Syah bin Sultan Muhammad Syah Lamri. Garis silsilahnya bersambung hingga Hasan Al-Mutsanna bin Hasan Mujtaba bin Sayyidina Ali. Sultan selanjutnya adalah Sultan Ali Riayat Syah yang bersengketa dengan saudaranya, Sultan Husen yang memimpin Pidie.

Sultan Husein menyerang Kutaraja di bawah pimpinan pemuda bernama Iskandar Mahkota Alam. Mereka gagal dan Mahkota Alam Mahkota Alam ditawan. Kekalahan Aceh Darussalam atas Portugis membuat Mahkota Alam Mahkota Alam geram. Dia memohon untuk diberikan kesempatan menyerang Portugis. Keberhasilannya membuat hukumannya dihapuskan. Berkat usaha keluarganya, para saudagar memberi dukungan kepada

¹ Sudirman, *PEMANFAATAN PENINGGALAN SEJARAH KERAJAAN LAMURI SEBAGAI MUSEUM SITUS* (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Aceh, 2022), 5.

Mahkota Alam Mahkota Alam naik tahta menjadi sultan Aceh Darussalam kedua belas. Mahkota Alam Mahkota Alam sendiri merupakan keturunan dari Ali Mughayat Syah yang merupakan keturunan dari raja-raja Mahkota Alam yang sebelumnya merupakan Kerajaan Lamuri. Sementara ibunya adalah keturunan dari raja Darul Kamal. Gabungan Darul Kamal dan Mahkota Alam itulah merupakan cikal bakal Kesultanan Aceh Darussalam.

Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam pernah menyerang Portugis di Malaka, namun raja Johor terus menerus berpihak pada Portugis. Raja Johor juga membantu menaikkan tahta seorang raja Pahang dari golongan pro Portugis. Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam kembali menyerang Johor dan Pahang. Raja Pahang berhasil melarikan diri. Sepuluh ribu orang Pahang dibawa ke Aceh. Di antaranya adalah Kamaliah Putri Pahang yang dinikahi Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Putri Pahang itu berperang menasehati Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam untuk mendirikan Majelis Permusyawaratan pada Kesultanan Aceh Darussalam yang berjumlah tujuh puluh tiga orang. Di antara peran majelis ini adalah membuat kanun yang berisi kebijakan tata kelola pemerintahan oleh uleebalang di seluruh wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam.

Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam membangun hubungan baik dengan Inggris. Ratu Elizabeth I mengirim surat dan hadiah besar kepada Iskandar Muda. Surat itu dijawab dengan izin berdagang bagi saudagar Inggris dan Iskandar Muda mengirim surat dan hadiah balasan. Surat itu masih tersimpan di Inggris. Belanda juga punya hubungan baik dengan Iskandar Muda. Iskandar Muda pernah mengirim Tuanku Abdul Hamid dan rombongan ke Belanda yang menjadikan mereka sebagai diplomat pertama Nusantara ke Belanda. Karena sakit, Tuanku Abdul Hamid meninggal dan dimakamkan dengan prosesi penghormatan yang besar. Prancis juga punya hubungan baik dengan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Negeri itu pernah mengirimkan hadiah mewah berupa cermin besar. Namun cermin mewah itu pecah di perjalanan dan tetap diserahkan kepada Iskandar Muda. Dia menerimanya sebagai tanda penghormatan dan penghargaan.

Kosmopolitanisme Aceh Darussalam

Kesultanan Aceh Darussalam memiliki peran signifikan dalam sejarah Alam Melayu, khususnya dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara. Didirikan pada awal abad ke-16, Kesultanan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam dari 1607 hingga 1636. Wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam mencakup sebagian besar Sumatera hingga Semenanjung Malaya. Kesultanan Aceh Darussalam dikenal sebagai pusat pembelajaran dan kebudayaan Islam di Nusantara, dengan banyak ulama dan cendekiawan Muslim dari berbagai wilayah datang ke Aceh untuk belajar dan mengajar. Kesultanan ini juga berperan dalam perdagangan internasional, menghubungkan Nusantara dengan Timur Tengah, India, dan Eropa. Kondisi ini menjadikan Kesultanan Aceh Darussalam sebagai salah satu pusat ekonomi maritim terbesar pada zamannya. Kesultanan Aceh Darussalam memainkan peran penting dalam perlawanan terhadap kolonialisme Eropa, khususnya Portugis di Malaka, menjadikannya simbol kekuatan dan kedaulatan Islam di wilayah Alam Melayu Nusantara.²

Kutaraja merupakan ibukota Kesultanan Aceh Darussalam. Sekitar empat ribu tentara yang selalu berjaga jaga di berbagai penjuru kota menunjukkan betapa besarnya

² Darwis A. Soelaiman, "Aceh Dalam Konteks Dunia Melayu," in *Warisan Budaya Melayu-Aceh* (Banda Aceh: PUSMA, 2003), 114.

kota tersebut. Kutaraja adalah kota besar yang memiliki tiga pusat pasar. Terdapat tiga lapangan di sana. di antaranya adalah yang berada di tengah kota, di dataran tinggi yang berada di hulu sungai, dan yang tidak jauh dari dermaga. Di sana segala jenis dagangan diperjualbelikan. Mulai dari biji-bijian hingga berbagai komoditas yang dibawa dari negeri-negeri yang jauh.

Pemukiman Kutaraja setidaknya memiliki tidak kurang seratus ribu orang. Itu adalah jumlah yang sangat padat untuk sebuah kota pada abad enambelas atau abad ketujuh belas. Satu sumber Eropa menceritakan, dalam menjelajah Kutaraja dan sekitarnya, negeri tersebut seolah-olah hanya semak belukar. Namun tiba-tiba bisa menemukan satu pemukiman yang ramai. Rumah warga sulit terlihat langsung, kecuali berada di depannya, tersembunyi oleh pepohonan. Rumah dibangun dengan dinding anyaman. Rumah panggung adalah dominan di sana. Rumah yang tersembunyi oleh pepohonan dengan bangunan membuat orang Eropa bermimpi punya rumah seindah itu. Sebab itulah hingga hari ini, kompleks hunian elite di Barat berusaha menghadirkan hunian dengan nuansa tropis.

Bahasa yang digunakan warga Kutaraja dan sekitarnya adalah bahasa Melayu. Dilaporkan tidak ada bahasa kedua. Hal ini sama dengan di Pasai. Masyarakat menggunakan bahasa Melayu. Tidak ada catatan yang menunjukkan adanya penggunaan bahasa Aceh. Literatur-literatur yang tersedia dalam bahasa Aceh hanya ditulis sekitar abad kesembilan belas. Sebelumnya, semua literatur yang ditulis adalah menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Arab. Di dalam lembaga pendidikan, sebagaimana pada Jamiah Baiturrahman maupun sebelumnya di Zawiyah Blang Peuria, Kesultanan Samudra Pasai, bahasa pengantarnya adalah bahasa Arab, bahasa Persia, dan bahasa Melayu.

Bahasa Melayu juga menjadi bahasa persatuan para pedagang di Kepulauan Melayu Nusantara. Meskipun demikian, tidak sedikit orang Aceh waktu itu yang menguasai bahasa Portugis, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Mereka dipercayakan sultan untuk menjadi diplomat. Tidak hanya untuk urusan politik, namun juga untuk urusan ekonomi. Karena sangat banyak para pedagang mancanegara yang bermukim lama di Kutaraja. Bahkan terdapat banyak perkampungan ragam etnis. Misalnya ada kampung Cina, ada Kampung Inggris, ada kampung India, dan sebagainya. Pedagang dan diplomat Timur Tengah, meskipun memiliki perkampungan tersendiri, namun mereka tidak hidup eksklusif. Orang-orang dari Timur Tengah sangat mudah berbaur di Kutaraja maupun negeri Melayu lainnya. Sangat banyak di antara mereka yang bermukim permanen dan membangun keluarga di negeri-negeri Melayu. Faktor utamanya adalah karena kesamaan keagamaan. Agama membuka seluruh pintu bagi warga Timur Tengah dan Aceh Darussalam untuk saling berbaur.

Sebab itulah, meskipun awalnya menjadi diplomat atau pedagang, kemudian banyak orang Timur Tengah yang menetap di Kutaraja. Sebagian meninggalkan pekerjaan awalnya dan alih profesi dan menggeluti pekerjaan-pekerjaan sebagaimana dilakukan warga lokal seperti menjadi pedagang lokal, pandai logam, arsitek, nelayan, dan sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah profesi umum yang dilakukan warga Kutaraja. Ahli logam terdiri dari pandai besi, pandai emas, dan sebagainya. Pandai emas banyak yang bekerja untuk sultan. Mereka membuatkan perhiasan sesuai keinginan. Selain dari emas, perhiasan juga dibuat dari suasa. Pandai besi memproduksi alat-alat pertanian, perikanan, dan peperangan. Mereka bisa menciptakan arit, jangkar, pedang, dan

sebagainya. Alat-alat perang biasanya diproduksi untuk tentara kerajaan. Kesultanan Aceh Darussalam membutuhkan banyak pedang, baju zirah, kapak, fasilitas pendukung senjata meriam, dan sebagainya.

Profesi nelayan sangat ramai. Sebagian bekerja pada kapal besar dan bekerjasama dengan industri perikanan. Sebagian mencari ikan pada perahu kecil. Biasanya perahu kecil berisi satu atau dua orang untuk mencari ikan tidak jauh dari bibir pantai. Para nelayan, demikian juga ragam profesi lainnya, tidak perlu khawatir karena banyak militer yang menjaga dan melindungi warga. Keamanan tinggi juga membuat para pedagang dari negeri-negeri yang jauh tidak khawatir menetap di Kutaraja hingga tiba waktu kembali melaut.

Kesultanan Aceh Darussalam memiliki banyak perangkat militer dan benteng di mana-mana. Tentara-tentara rutin menjaga benteng yang banyak jumlahnya. Menyerang Kesultanan Aceh Darussalam adalah hal mustahil, meskipun musuh saat itu adalah armada Portugis yang kuat. Sama seperti Samudra Pasai dan Peureulak, eksistensi Aceh Darussalam sangat ditentukan oleh dominasi atas lalu lintas perdagangan Selat Malaka. Sebab itulah, Aceh Darussalam melakukan penyerangan ke Malaka karena Portugis telah berusaha menjadikan Malaka sebagai pusat perekonomian Selat Malaka. Hal ini menunjukkan bagaimana Aceh Darussalam setiap saat harus waspada. Sebab itulah tentara ditempatkan di mana-mana meskipun pada pusat kota yakni Kutaraja tampak sebagai pusat perdagangan yang sangat aktif. Aktivitas perdagangan yang intens tersebut menjadikan Kesultanan Aceh Darussalam sebagai negeri yang maju dan kosmopolit.

Kosmopolitanisme Aceh Darussalam juga terlihat pada tata kota yang begitu rapi. Mulai dari jalur laut, Aceh Darussalam membuka tiga arah lalu lintas ke Samudra yakni paling selatan ke Timur Tengah dan Eropa, jalur tengah ke India, dan jalur utara ke Teluk Benggala. Kapal-kapal yang masuk juga disediakan dermaga memadai. Kapal-kapal kecil dapat menjelajah pedalaman melalui tiga muara sungai. Muara selatan menjangkau pusat kota yang di dalamnya tersedia lapangan luas sebagai pusat pasar. Di sana transaksi perdagangan berlangsung secara intensif. Jalur tengah sebenarnya bisa menjangkau pedalaman, namun dikondisikan sebagai jalur menuju Istana Darud Dunya. Jalur utara merupakan jalur terpanjang yang terhubung ke sungai Krueng Aceh. Terdapat banyak negeri di sana. Setiap negeri memiliki komoditas penting yang dibutuhkan para pedagang. Semua jalur itu memiliki tingkat keamanan tinggi untuk membuat para pedagang aman dan merasa nyaman.

Kemajuan perdagangan yang dilindungi sultan tentu saja penting untuk memajukan negeri dan memberikan gaung bagi kebesaran Kesultanan Aceh Darussalam. Pihak istana dapat hidup dengan mewah. Namun mereka menyadari tanggungjawab besar membesarkan negerinya. Dengan kekayaan dimiliki, itu menjadi modal penting untuk terus memperluas pengaruh. Tidak hanya Malaka, Kesultanan Aceh Darussalam melakukan ekspansi bagian utara Pulau Sumatra hingga Jambi. Pada bagian selatan, kekuasaannya meluas hingga Sumatera Barat. Semua negeri yang dikuasai itu memiliki kekayaan alam tinggi. Pelabuhan-pelabuhan sepanjang wilayah kekuasaan juga menjadi semakin ramai. Para pedagang merasa semakin nyaman untuk berdagang, karena itu adalah negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Status ini sangat penting, karena para pedagang dari negeri-negeri yang jauh paham bahwa berdagang dengan Aceh Darussalam itu menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tinggi.

Dalam kondisi seperti itu, masyarakat memanfaatkannya dengan memperkaya komoditas untuk dapat terlibat dalam sistem perekonomian. Masyarakat pinggir kota fokus menanam padi dan biji-bijian lainnya. Sambil itu, mereka memelihara unggas. Semua itu sangat dibutuhkan pasar lokal maupun internasional. Komoditas-komoditas yang dihasilkan masyarakat dapat dijual secara mandiri ke pasar-pasar. Juga dapat dijual kepada saudagar. Para saudagar akan menjual kepada saudagar-saudagar asing yang datang mencari berbagai kebutuhan hasil bumi, baik untuk bekel perjalanan, maupun untuk dijual ke berbagai negeri.

Tasawuf Filosofis Menghantarkan Aceh Darussalam Menjadi Negeri Kosmopolitan

Budaya ilmu pengetahuan yang berkembang memang membutuhkan lingkungan yang mendukung bagi para pemikir dan cendekiawan untuk mengekspresikan gagasan mereka. Situasi yang nyaman dan kondusif akan mendorong terciptanya ruang bebas untuk berdiskusi, bereksperimen, dan mengembangkan ilmu. Syarif Hidayatullah, yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, memilih Pulau Jawa sebagai pusat dakwah dan pengembangan ajarannya. Di sana, beliau berperan penting dalam penyebaran Islam dan menjadi tokoh utama dalam membentuk budaya ilmu pengetahuan yang adaptif dengan budaya lokal. Demikian pula dengan Hamzah Fansuri, seorang arif sufi asal Aceh yang memilih Fansur sebagai tempat untuk menyebarkan ajarannya. Lingkungan Kerajaan Aceh Darussalam saat itu memang dikenal sebagai pusat intelektual dan religius, yang memungkinkan Hamzah Fansuri mengekspresikan pemikirannya tentang tasawuf falsafi. Kedua tokoh asal Samudra Pasai alumni Zawiyah Blang Pria ini menunjukkan bahwa kehadiran tempat yang nyaman dan kondusif sangat penting untuk menghasilkan budaya ilmu pengetahuan yang berkembang.³

Kesultanan Aceh Darussalam memang memiliki sejarah yang kuat dan berakar pada peran penting para keturunan Pasai. Setelah Pasai jatuh di tangan kekuatan asing, para bangsawan dan intelektual Pasai yang tersingkir membawa pengalaman politik, keagamaan, dan kebudayaan yang kaya ke Aceh Darussalam. Dengan dukungan kerajaan kecil di sekitar Kutaraja, mereka berhasil mendominasi dan menyatukan beberapa kerajaan kecil, yang menjadi fondasi Kesultanan Aceh Darussalam. Pengalaman politik dan strategi dari cendekiawan dan bangsawan Pasai menjadi modal besar untuk membentuk kesultanan yang kuat dan berpengaruh. Kesultanan Aceh Darussalam kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, keagamaan, dan kebudayaan di wilayah Kepulauan Melayu-Nusantara. Tak hanya berfokus pada aspek militer, kesultanan ini juga berkontribusi besar dalam penyebaran Islam dan menjadi pusat ilmu pengetahuan serta jaringan ulama di Nusantara.

Pada awal berdirinya, Kesultanan Aceh Darussalam memang menghadapi tantangan stabilitas politik yang serius, terutama karena dominasi para pengusaha dan pedagang. Posisi strategis di Selat Malaka menjadikan Aceh Darussalam sebagai pusat perdagangan yang besar, tetapi ini juga membuat pengaruh para saudagar sangat kuat, bahkan melebihi kekuatan politik kesultanan itu sendiri. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan yang berdampak pada stabilitas politik. Situasi baru mulai berubah di masa Sultan Alaidin Riayat Syah, yang mampu memperkuat otoritas kesultanan dan meredam dominasi para

³ Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad Vol. I* (Medan: Waspada, n.d.), 187–196.

saudagar. Sultan Alaidin Riayat Syah dikenal karena keberhasilannya dalam memperluas wilayah kekuasaan Aceh melalui penaklukan strategis terhadap daerah-daerah penting seperti Pasai, Daya, dan Pedir, yang kala itu berada di bawah pengaruh Portugis. Keberhasilan ini tidak hanya memperluas wilayah, tetapi juga meneguhkan kesultanan sebagai kekuatan politik dan militer utama di Nusantara masa itu. Dengan kekuatan yang lebih kukuh, Aceh Darussalam mulai berperan sebagai kekuatan politik yang stabil, sekaligus mempertahankan posisinya sebagai pusat perdagangan. Stabilitas ini memungkinkan Aceh Darussalam untuk menjadi salah satu kekuatan besar di Nusantara, yang tidak hanya berfokus pada perdagangan, tetapi juga pada pengembangan keagamaan dan ilmu pengetahuan di Nusantara.

Pada masa Sultan Alaidin Riayat Syah, tatanan politik dan sosial Aceh Darussalam mengalami reformasi yang signifikan. Kekuatan kaum saudagar, meskipun tetap diberikan kebebasan luas dalam menjalankan aktivitas perdagangan, ditundukkan dari campur tangan politik. Pembatasan ini menciptakan keseimbangan antara kekuatan ekonomi dan otoritas politik, memungkinkan pemerintahan untuk lebih terkontrol dan stabil tanpa ancaman dari pengaruh kelompok saudagar. Dalam konteks keberagaman, Sultan Alaidin Riayat Syah menerapkan sistem terbuka yang sangat toleran, di mana pemikiran seperti tasawuf filosofis yang diajarkan oleh Hamzah Fansuri yang telah diajarkan sejak Sultan Ali Mughayat Syah, diterima sebagai bagian dari nilai-nilai spiritual masyarakat. Pemikiran ini mendukung kosmopolitanisme Aceh dengan membuka pandangan masyarakat terhadap perbedaan, sehingga menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi berbagai kelompok, termasuk saudagar dari beragam latar belakang.

Dengan terbukanya masyarakat dan dukungan terhadap perdagangan dunia, Aceh berkembang menjadi pusat ekonomi yang ramai. Pedagang dari berbagai wilayah, seperti Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Timur, merasa nyaman dengan sikap terbuka masyarakat Aceh. Situasi ini meningkatkan kegiatan ekonomi secara signifikan, membawa kemakmuran dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Aceh Darussalam.⁴

Sepeninggal Sultan Alaidin Riayat Syah Al-Kahar, pengaruh ajaran tasawuf filosofis yang dibawa Hamzah Fansuri tetap kuat dalam masyarakat Aceh Darussalam. Ajaran ini tidak hanya memperdalam spiritualitas masyarakat tetapi juga menciptakan etos kerja dan nilai yang mendukung kemajuan ekonomi. Dengan pandangan tasawuf filosofis yang menekankan hubungan antara manusia dan Haqq Ta'ala, masyarakat Aceh memiliki motivasi yang kuat dalam bekerja dan berdagang, yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, meskipun ekonomi berkembang pesat, stabilitas politik menjadi tantangan tersendiri. Kehilangan figur yang kuat seperti Sultan Alaidin Riayat Syah Al-Kahar dan Hamzah Fansuri mengakibatkan lemahnya struktur politik dan munculnya perebutan kekuasaan internal. Hal ini membuka celah bagi Portugis untuk semakin memperkuat pengaruh mereka di sekitar Selat Malaka dan menjadi ancaman serius bagi Aceh. Di sisi lain, tasawuf filosofis yang diajarkan Hamzah Fansuri justru berkembang secara masif di masyarakat Aceh setelah wafatnya pada 1527. Pemikiran-pemikiran tasawuf ini menyebar ke berbagai lapisan masyarakat, memperkaya kehidupan spiritual, dan menjadikan Aceh Darussalam sebagai pusat intelektual dan spiritual yang

⁴ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)* (Jakarta: Gramedia, 2014), 123.

dihormati di Nusantara. Pengaruh ini bahkan menarik minat cendekiawan dan peminat tasawuf dari wilayah lain, yang datang untuk belajar dan bertukar ilmu di Aceh Darussalam.

Setelah Sultan Alaidin Riayat Syah Al-Kahar wafat, Kesultanan Aceh Darussalam memasuki periode yang cukup rentan. Kaum saudagar yang sebelumnya dibatasi pengaruh politiknya mulai memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat kendali mereka dalam pemerintahan. Para pedagang yang memiliki modal besar cenderung mendukung sultan-sultan yang memberikan keleluasaan bagi aktivitas ekonomi mereka, sementara mereka mencoba menghambat atau bahkan menggulingkan pemimpin yang tidak sesuai dengan kepentingan ekonomi mereka. Kondisi ini menyebabkan ketidakstabilan dalam kepemimpinan politik Aceh, karena kepentingan ekonomi seringkali bertabrakan dengan kepentingan politik yang lebih luas, termasuk pertahanan terhadap ancaman eksternal. Situasi ekonomi yang memburuk pasca wafatnya Sultan Alaidin Riayat Syah Al-Kahar, memberikan kesempatan bagi Portugis untuk memperluas pengaruh mereka di wilayah Selat Malaka, dan ini tidak menguntungkan Kesultanan Aceh Darussalam. Ketidakstabilan politik dan perebutan kekuasaan internal membuat pertahanan Aceh melemah, sehingga Portugis dapat lebih mudah mengakses dan memanfaatkan jalur perdagangan, yang seharusnya berada dalam kendali Kesultanan Aceh. Pengaruh besar para saudagar terhadap politik ini memperlihatkan dampak negatif dari ketidakseimbangan antara kekuatan ekonomi dan otoritas politik. Ketergantungan pada kekuatan ekonomi tanpa adanya pengawasan yang kuat dari pemerintahan membuat stabilitas politik rapuh, dan pada akhirnya, Aceh kehilangan kontrol penuh atas ekonomi dan keamanannya di wilayah yang strategis tersebut. Situasi ini mulai membaik setelah Sultan Alaidin Riayat Syah Sayyid al-Mukammil naik tahta.

Ketika Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam naik tahta, Kesultanan Aceh Darussalam mengalami kebangkitan dalam berbagai bidang, termasuk dalam pertahanan, ekonomi, dan budaya. Salah satu pencapaian besar Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam adalah kemampuannya mengatasi ancaman Portugis dan memulihkan stabilitas politik Aceh, menjadikannya kekuatan besar di Nusantara. Di sisi lain, masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam juga merupakan puncak perkembangan ajaran tasawuf filosofis yang masih mendominasi pemahaman keberagamaan masyarakat Aceh. Tasawuf filosofis pada masa ini berkembang lebih dalam melalui konsep Martabat Tujuh, yang diperkenalkan oleh Syamsuddin Al-Sumatrani, seorang sufi besar yang berasal dari Samudra Pasai. Konsep Martabat Tujuh menjelaskan proses keberadaan manusia dan alam dalam tujuh tingkatan atau martabat, yang merupakan refleksi hubungan antara Tuhan dan alam semesta.⁵

Kehadiran Syamsuddin Al-Sumatrani menunjukkan kesinambungan peran Samudra Pasai sebagai pusat keilmuan dan spiritualitas, yang sebelumnya juga menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Kesultanan Pasai, yang sebelumnya digabungkan dengan Aceh Darussalam oleh Sultan Alaidin Riayat Syah Al-Kahar, terus memainkan perannya sebagai pusat pembelajaran tasawuf di Nusantara. Tradisi keilmuan ini menarik perhatian banyak ulama dan cendekiawan dari wilayah lain, termasuk tokoh sufi asal Minangkabau seperti Saiful Rijal, yang diduga juga belajar di Samudra Pasai pada Zawiyah Blang Pria. Dengan berkembangnya tasawuf filosofis di Samudra Pasai dan Aceh

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Penilaian Teologis Atas Paham Wahdatul Wujud Dalam Tasawuf Syamsuddin Sumatrani* (Padang: IAIN Imam Bonjol Press, 1992), 23.

Darussalam, ajaran ini berperan sebagai sistem nilai yang mendalam dan memperkaya wawasan spiritual masyarakat, menjadikan Aceh Darussalam sebuah kekuatan kosmopolitan yang tidak hanya kuat secara politik dan ekonomi, tetapi juga kaya akan tradisi keilmuan dan keberagaman yang berpengaruh luas di Alam Melayu.

Syamsuddin Al-Sumatrani, sebagai tokoh penting dalam perkembangan tasawuf filosofis di Kesultanan Aceh Darussalam, memang menggabungkan pengaruh dari berbagai sumber, termasuk ajaran tasawuf Syaikh Fadhullah Burhanpuri dari India dan karya-karya sufi lokal seperti Hamzah Fansuri. Pengaruh Syaikh Fadhullah Burhanpuri tampak dalam adopsi dan pengembangan konsep Martabat Tujuh, yang menjadi landasan penting dalam ajaran tasawuf filosofis di Aceh. Konsep ini menggambarkan hierarki atau tingkatan keberadaan yang merefleksikan hubungan antara Tuhan dan makhluk, sebuah pandangan yang sangat dihargai dalam tradisi tasawuf Nusantara.

Syamsuddin Al-Sumatrani tidak hanya melanjutkan pemikiran-pemikiran ini, tetapi juga memberikan penjelasan atau syarah yang memperluas pemahaman masyarakat terhadap karya-karya Hamzah Fansuri. Salah satu karya penting yang disyarahnya adalah Syair Ruba'i dengan judul *Ruba'i Hamzah Fansuri*, yang merupakan penjelasan atas salah satu puisi Hamzah Fansuri yang kaya akan makna filosofis dan spiritual. *Ruba'i Hamzah Fansuri* yang dikarang dalam bahasa Melayu menggunakan huruf Arab Melayu, telah ditransliterasi oleh Ali Hasjmy dan diterbitkan di Malaysia, sehingga dapat diakses dan dipelajari lebih luas oleh generasi berikutnya. Melalui syarah dan upaya Syamsuddin Al-Sumatrani dalam mengintegrasikan ajaran Hamzah Fansuri dan pengaruh tasawuf dari India, ajaran tasawuf filosofis di Aceh tidak hanya diperkaya, tetapi juga mendapatkan landasan intelektual yang kuat. Ini memberikan dampak mendalam terhadap spiritualitas masyarakat dan menegaskan posisi Aceh Darussalam sebagai pusat intelektual Islam di Nusantara. Pemikiran dan tradisi sufi berkembang dan terus berpengaruh pada perkembangan Islam di negeri-negeri di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam.

Ajaran tasawuf filosofis mendorong masyarakat Aceh Aceh Darussalam menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan dan menghargai berbagai latar belakang budaya. Hal ini memungkinkan Aceh membangun relasi harmonis dengan negeri-negeri dari berbagai belahan dunia. Para pedagang dan cendekiawan dari Timur Tengah, India, Cina, dan Eropa merasa nyaman berada di Aceh karena masyarakatnya yang ramah dan kosmopolit, serta karena adanya jaminan keamanan dan kebebasan dalam beragama serta berdagang. Kesuksesan diplomatik Aceh dengan bangsa-bangsa asing memperkuat posisi Aceh Darussalam sebagai pusat perdagangan dan budaya di Selat Malaka. Ajaran tasawuf filosofis yang dianut masyarakat Aceh Darussalam menjadikan mereka siap menerima dan berinteraksi dengan beragam budaya dan pemikiran, sekaligus memperkuat hubungan Aceh dengan dunia internasional, baik dalam perdagangan maupun dalam jaringan intelektual. Aceh Darussalam pada masa itu benar-benar menjadi pusat pertemuan berbagai bangsa dan budaya, yang memperkaya peradaban Islam di Nusantara.⁶

Dari Kosmopolitanisme ke Konservativisme

Ketika Sultan Iskandar Tsani naik takhta, terjadi pergeseran dalam pemahaman agama di Aceh Darussalam. Tasawuf filosofis yang sebelumnya dikembangkan oleh

⁶ Cut Natari Neubie Phonna, "Fungsi Ruang Kerajaan Peureulak," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 6 (June 16, 2023): 1027–1039, <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/236>.

Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Al-Sumatrani dianggap terlalu berat dalam memahami konsep-konsep keagamaan, yang menekankan pada pencarian hakikat Tuhan melalui pendekatan filosofis. Di bawah pengaruh ulama konservatif seperti Nuruddin Ar-Raniri, yang mengedepankan pemahaman Islam yang lebih literal, ajaran itasawuf filosofis dikritik tajam. Nuruddin Ar-Raniri menganggap tasawuf filosofis mereka tidak sejalan dengan akidah Islam dan bahkan menilainya sebagai bid'ah yang menyesatkan. Nuruddin Ar-Ranir memandang ajaran tersebut berpotensi membawa penyimpangan dalam pemahaman tauhid. Karena itu, ia mempromosikan tasawuf yang menurutnya ketat mengikuti syariat Islam. Pandangan Nuruddin Ar-Raniri cukup berpengaruh hingga menyebabkan kitab-kitab dan ajaran Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Al-Sumatrani ditentang dan dianggap sesat.⁷

Nuruddin Ar-Raniri melakukan langkah-langkah tegas untuk "membersihkan" ajaran tasawuf filosofis dari wilayah Aceh Darussalam. Ia berupaya menguatkan pemahaman Islam yang ia anggap murni dan benar dengan membentuk sistem keagamaan yang lebih literal dan terfokus pada syariat Islam yang ketat sesuai pandangannya. Bagi Nuruddin Ar-Raniri, hanya ada satu sistem yang layak dijadikan landasan keagamaan, yaitu yang bersifat literal dan teguh pada akidah tanpa pengaruh tasawuf falsafi. Dalam karyanya, *Bustanus Salatin*, Nuruddin Ar-Raniri menggambarkan imajinasinya tentang sebuah dunia ideal yang sejalan dengan visi keagamaannya—negara yang didasarkan pada aturan agama yang ketat dan menghindari unsur-unsur tasawuf filosofis.⁸ Bagi Nuruddin Ar-Raniri, pandangan Hamzah Fansuri dan Syamsuddin al-Sumatrani dianggap menyimpang dan sesat karena terlalu membuka ruang untuk pemikiran-pemikiran yang dianggapnya dapat menodai akidah Islam.⁹

Nuruddin Ar-Raniri, melalui *Tibyan fi Ma'rifatul Adyan* merumuskan pandangan teologis yang ketat dengan tujuan mensingularisasi ajaran agama di Aceh Darussalam. Di dalam kitab tersebut, ia menegaskan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, sedangkan agama-agama lain dianggap sesat.¹⁰ Begitu pula, aliran atau pandangan dalam Islam yang berbeda dari keyakinannya turut dipandang menyesatkan dan dilarang. Pendekatan teologis eksklusif ini membawa dampak yang signifikan pada kehidupan sosial masyarakat Aceh Darussalam yang mejemuk. Jika sebelumnya masyarakat hidup dalam kemakmuran dan terbuka terhadap beragam pemahaman, kehadiran Nuruddin Ar-Raniri menimbulkan perselisihan terkait aliran keagamaan. Hal ini menciptakan ketegangan yang membuat masyarakat lebih fokus pada perdebatan ideologis daripada meneruskan kemajuan yang telah dicapai bersama, yang pada akhirnya memengaruhi keharmonisan sosial serta kesejahteraan masyarakat.

Pembakaran karya-karya tasawuf filosofis Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Al-Sumatrani akibat pengaruh Nuruddin Ar-Raniri merupakan tindakan yang mencerminkan kekerasan atas nama agama. Aksi ini tidak hanya bertujuan untuk menghapus jejak

⁷ Miswari, "Gagasan Nuruddin Ar-Raniri Dalam 'Tibyan Fi Ma'Rifah Al-Adyan,'" *At-Tafkir* 11, no. 1 (October 20, 2018): 31, <http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/527>.

⁸ Jelani Harun, "Bustan Al-Salatin, 'the Garden of Kings': A Universal History and ADAB Work from Seventeenth-century ACEH," *Indonesia and the Malay World* 32, no. 92 (March 2004): 21–52.

⁹ Azyumardi Azra, *The Origins of Islamic Reformism In Southeast Asia* (Honolulu: Allen & Unwin and University of Hawai'i Press, 2004), 52.

¹⁰ Ismail Fahmi Arrauf Nasution, "Termination of Wahdatul Wujud In Islamic Civilization In Aceh: Critical Analysis of Ithaf Ad-Dhaki, The Works of Ibrahim Kurani," *ADDIN* 11, no. 2 (August 1, 2017): 401, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/view/3356>.

pemikiran mereka, tetapi juga berfungsi sebagai ancaman bagi siapa saja yang masih mempertahankan ajaran tasawuf filosofis. Dengan tindakan tersebut, Nuruddin Ar-Raniri ingin menegaskan bahwa hanya satu pemahaman keagamaan yang sah di Aceh—yakni, pemahaman yang sesuai dengan doktrin ketat yang ia yakini. Nuruddin Ar-Raniri menghendaki sistem keagamaan yang terstruktur dan seragam, tanpa ruang bagi interpretasi atau aliran yang berbeda. Ia melihat keberagaman pemahaman sebagai ancaman terhadap stabilitas agama yang ia bayangkan. Oleh karena itu, kebebasan dalam menganut atau mengembangkan aliran yang berbeda menjadi hal yang dilarang. Pandangan demikian menciptakan suasana yang kaku dan penuh batasan bagi pengikut ajaran lain di Aceh Darussalam. Sistem kaku dalam masyarakat kosmopolit menyebabkan situasi sosial berubah. Dalam sistem keagamaan yang tertutup, mustahil keberagaman dapat bertahan. Padahal kemajuan Aceh Darussalam sangat bergantung pada ragam etnis dari berbagai belahan dunia datang dan memberikan kontribusinya bagi kemajuan ekonomi dan ilmu pengetahuan.

Kehadiran Saiful Rijal yang berhasil mengalahkan Nuruddin Ar-Raniri dalam perdebatan memberikan angin segar bagi pengikut tasawuf filosofis di Aceh. Kemenangan argumen Saiful Rijal menunjukkan bahwa meskipun ada upaya keras dari Nuruddin Ar-Raniri untuk menghapuskan ajaran tasawuf filosofis, ajaran ini masih hidup dan mendapatkan dukungan kuat dari sebagian masyarakat. Meski pengaruh Saiful Rijal tidak berlangsung lama, kemunculannya membuktikan bahwa paham yang diajarkan oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Al-Sumatrani tetap berakar di kalangan masyarakat. Situasi ini juga memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat Aceh sebelumnya telah nyaman dengan keberagaman pemahaman tasawuf yang lebih terbuka. Upaya Nuruddin Ar-Raniri untuk menggantikan pandangan dominan tersebut masa itu dengan sistem keagamaan yang lebih tertutup dan terkontrol menunjukkan ambisinya untuk membentuk cara beragama yang seragam sesuai pandangannya. Namun, respons masyarakat yang tetap setia pada tasawuf filosofis memperlihatkan bahwa upaya tersebut tidak sepenuhnya berhasil dalam mengubah cara beragama yang telah menjadi bagian dari identitas Aceh Darussalam.

Jalan Tengah Abdurrauf Al-Singkili

Kepulangan Abdurrauf Al-Singkili dari studinya di Timur Tengah membawa babak baru bagi perkembangan pemikiran keagamaan di Aceh. Setelah menggantikan Saiful Rijal, Abdurrauf Al-Singkili berupaya menyelaraskan ajaran tasawuf filosofis dengan ajaran yang lebih konservatif, sebagaimana yang diajarkan oleh Nuruddin Ar-Raniri. Banyak sarjana memandang Abdurrauf Al-Singkili sebagai figur yang mampu mendamaikan kedua aliran tersebut. Namun sebenarnya pandangan dan sikap Abdurrauf Al-Singkili justru mengarah pada terminasi tasawuf filosofis di Aceh Darussalam. Abdurrauf Al-Singkili kemudian memperkenalkan ajaran tasawuf yang dianggap lebih sesuai dengan identitas Ahlussunnah wal Jamaah, yang berfokus pada integrasi aspek tasawuf dalam batas syariat yang lebih ketat. Ajaran ini dianggap berhasil menguatkan identitas keagamaan yang lebih sejalan dengan identitas Ahlussunnah wal Jamaah, yang pada akhirnya membawa identitas Ahlu Sunnah wal Jamaah sesuai ajaran Abdurrauf Al-Singkili menjadi karakter dominan dalam kehidupan beragama masyarakat. Dengan pendekatannya, Abdurrauf Al-Singkili dianggap berhasil membangun stabilitas yang lebih besar dan mengonsolidasikan pemahaman Islam

yang seragam di Aceh Darussalam, menggantikan tasawuf filosofis yang sebelumnya berkembang.¹¹

Cara Abdurrauf Al-Singkili mendiamkan ajaran tasawuf filosofis adalah dengan meminta kepada gurunya, Ibrahim Kurani, untuk memberikan pandangan terkait perdebatan antara ajaran tasawuf falsafi dan teologi. Ibrahim Kurani memberikan pandangannya dengan menulis kitab *Ithaf al-Dhaki* mencari titik temu antara ajaran tasawuf filosofis Ibn 'Arabi dan teologi Abu Hasan al-Asy'ari, dengan menekankan dimensi persamaan di antara keduanya.¹² Namun, meskipun Ibrahim berusaha menyelaraskan pemikiran Ibn 'Arabi dengan ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah yang diwakili oleh Abu Hasan al-Asy'ari.

Sebenarnya, secara ilmiah, *Ithaf al-Dhaki* tidak memberikan solusi signifikan dalam menyelesaikan persoalan, bahkan keluar dari konteks. Perdebatan yang sedang terjadi di Aceh Darussalam adalah tasawuf filosofis yang dibawa oleh Syamsuddin Al-Sumatrani dianggap oleh Nuruddin Ar-Raniri menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Karena memang dalam konteks sosial, ajaran tasawuf falsafi yang diajarkan Syamsuddin Al-Sumatrani memang sangat sulit dipahami masyarakat umum sehingga menimbulkan kegaduhan sosial. Kemudian karena tidak mempelajari ajaran Hamzah Fansuri secara cermat, atau bahkan mungkin hanya memahaminya melalui penjelasan pihak tertentu, ajaran Hamzah Fansuri juga ikut dianggap oleh Nuruddin Ar-Raniri telah menyimpang. Sementara Nuruddin Ar-Raniri dalam *Tibyan fi Ma'rifat Al-Adyan*, tidak memberikan kritik eksplisit terhadap ajaran Ibn 'Arabi. Bahkan dalam karya lainnya *Asrar Al-Insan* mengapresiasi pemikiran Ibn 'Arabi.

Kitab *Ithaf al-Dhaki*, mencari titik temu pemikiran Ibn 'Arabi dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Sementara konteks permasalahan adalah ajaran tasawuf falsafi yang diajarkan Syamsuddin Al-Sumatrani. Sementara Ibrahim Kurani tidak memahami pemikiran Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Al-Sumatrani. Dia hanya mendapatkan cerita bahwa di Aceh Darussalam terdapat perselisihan keagamaan antara penganut tasawuf filosofis dan penentangannya. Maka ditulislah *Ithaf Al-Dhaki* yang membahas mengenai tasawuf filosofis yang diajarkan Ibn 'Arabi dan teologi Abu Hasan Al-Asy'ari. Padahal antara dua ajaran tersebut, tidak terjadi pertentangan sosial. Bahkan Nuruddin Ar-Raniri sendiri yang menjadi penentang keras ajaran Syamsuddin Al-Sumatrani, tidak mempermasalahkan ajaran Ibn 'Arabi. Jadi sebenarnya *Ithaf Al-Dhaki* itu keluar dari konteks. Di samping itu, *Ithaf Al-Dhaki* mengemukakan dimensi ajaran Ibn 'Arabi yang sesuai dengan ajaran Abu Hasan Al-Asy'ari. Sementara sisi perbedaannya tidak dibahas. Padahal dalam konteks ilmu pengetahuan, bila ingin menemukan dimensi persamaan, banyak sekali hal-hal yang berbeda, punya titik arsir dimensi persamaan.

Kitab *Ithaf Al-Dhaki* berhasil mematahkan argumen kaum penganut tasawuf filosofis pada zamannya, membuat para pendukungnya cenderung memilih untuk berdiam diri. Di tengah perdebatan tersebut, Abdurrauf Al-Singkili tetap teguh menyebarkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang ia pahami dari gurunya, sebuah ajaran yang memiliki kesinambungan kuat dengan ajaran Imam Al-Ghazali. Untuk mengembangkan

¹¹ Nasution, "Termination of Wahdatul Wujud In Islamic Civilization In Aceh: Critical Analysis of Ithaf Ad-Dhaki, The Works of Ibrahim Kurani."

¹² Oman Fathurahman, *Ithaf Al-Dhaki: Tafsir Wahdatul Wujud Bagi Muslim Nusantara* (Bandung: Mizan, 2012).

pemahaman ini, Abdurrauf Al-Singkili memilih pendekatan yang untuk mencapai jalan tengah. Pendekatan ini sangat berbeda dengan metode yang digunakan oleh Nuruddin Ar-Raniri, yang kerap kali menuduh ajaran selain yang dianutnya sebagai ajaran sesat dan menyesatkan.

Abdurrauf Al-Singkili lebih memilih cara lembut dalam menyikapi perbedaan pemahaman tasawuf, terutama terhadap para pengikut tasawuf filosofis. Ia tidak serta merta menyingkirkan ajaran mereka, tetapi lebih pada mengarahkan dengan cara yang halus dan persuasif. Salah satu strategi yang ia gunakan adalah menulis kitab-kitab tasawuf akhlak berjudul *Tanbih Al-Masyi* yang memiliki sentuhan filosofis.¹³ Pendekatan ini diharapkan dapat menjembatani pemahaman para penganut tasawuf filosofis, yang saat itu kehilangan para tokoh utama mereka seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani, Syaikh Jamaluddin Al-Maldin, dan Saiful Rizal. Dengan nuansa tasawuf akhlak, Abdurrauf Al-Singkili berhasil menarik minat sebagian penganut tasawuf filosofis yang mulai merasa kehilangan arah. Pendekatan persuasif ini memungkinkan pemahaman akhlak yang lebih universal dalam tasawuf, sehingga ajaran yang dikembangkan Abdurrauf Al-Singkili dapat diterima oleh lebih banyak kalangan dan menjadi jalan tengah yang menyatukan berbagai pandangan dalam ranah keagamaan saat itu.

Kitab *Tanbih Al Masyi* yang dikarang Abdurrauf Al-Singkili, meski terlalu tinggi untuk kalangan umum pengikutnya, namun berhasil memberikan gambaran yang tidak terlalu bertolak belakang bagi pengikut tasawuf falsafi. Muatannya adalah ajaran tasawuf akhlak yang memuat kajian filosofis. Memang karya tersebut berbeda dengan tasawuf akhlak sebagaimana *Ihya Ulumuddin* yang dirumuskan Imam Al-Ghazali. *Ihya Ulumuddin* memuat kajian yang terlalu teknis mengenai akhlak dan *tazkiyah*. Sementara *Tanbih Al-Masyi* merupakan pembahasan ontologis, epistemologi, dan metodologis tasawuf akhlak. Sehingga memiliki muatan filosofis yang setidaknya sedikit dapat memenuhi kebutuhan intelektual para penganut tasawuf filosofis yang sebelumnya merujuk kepada ajaran Hamzah Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani, Jamaluddin Al-Maldin dan Syaiful Rizal. Sementara itu, penertiban masyarakat secara teknis yang memuat aturan ibadah dan pelaksanaan kehidupan sehari-hari yang dirumuskan dalam *Mir'atul Tullab*.

Sejatinya *Tanbih Al Masyi* tidak sejalan dengan kaidah tasawuf filosofis. Kitab tersebut merupakan kajian tinggi dalam tasawuf akhlak. Corak perbedaan utamanya misalnya, tasawuf falsafi menggunakan analogi bayangan cermin untuk menunjukkan bahwa tidak ada wujud selain Haqq Ta'ala. Sehingga bayangan cermin hanya gambaran semata, tidak memiliki wujud sama sekali, dan ketundukan bayangan cermin pada yang bercermin menunjukkan kefakiran mutlak makhluk. Sementara dalam itikad tasawuf akhlak, ingin menggambarkan bahwa yang bercermin dan gambar dalam cermin adalah dua wujud yang terpisah dan berbeda.

Karisma Abdurrauf Al-Singkili begitu besar sehingga kehadirannya melebihi pengaruh para sultanah Kesultanan Aceh Darussalam pada masa itu. Otoritasnya dalam ilmu dan agama menjadikannya tokoh yang disegani dan sulit ditandingi pada masanya, baik oleh kalangan bangsawan maupun ulama lainnya. Pada saat pengaruh Aceh Darussalam mulai melemah di panggung perdagangan dunia, khususnya di Selat Malaka, nama Abdurrauf Al-Singkili justru semakin berkibar. Dengan pengaruhnya yang luas, ajaran-ajarannya

¹³ Oman Fathurahman, *Tanbih Al-Masyi: Menyoal Wahdatul Wujud: Kasus Abdurrauf Singkel Di Aceh Abad 17* (Bandung: Mizan, 1999).

membentuk karakter keagamaan masyarakat Aceh Darussalam dan sekitarnya, menjadikan nilai-nilai yang ia bawa sebagai fondasi keberagamaan masyarakat Nusantara. Tidak berlebihan bila mengatakan bahwa ajaran Abdurrauf Al-Singkili adalah akar Islam jalan tengah di Nusantara.

Melalui lembaga pendidikan yang dipimpin, Zawiyah Raya di Kuala (yang disebut Dayah Raya dalam bahasa Aceh kemudian), Abdurrauf Al-Singkili menyebarkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang bercorak tasawuf akhlak hingga ke pelosok Nusantara. Lembaga tersebut menjadi pusat pembelajaran yang dihadiri oleh murid-murid dari berbagai kawasan yang jauh, menciptakan jaringan penyebaran agama yang kuat dan terstruktur.

Tak hanya terbatas di Aceh Darussalam, murid-muridnya yang telah menyelesaikan pendidikan di Zawiyah Raya, kembali ke daerah asal mereka di seluruh Nusantara, membawa serta ajaran Abdurrauf Al-Singkili dan mengadaptasikannya ke dalam komunitas masing-masing. Para murid Abdurrauf Al-Singkili kemudian menjadi pemuka agama yang dihormati di tempat masing-masing. Mereka mendirikan lembaga pendidikan, menyebarkan ajaran tasawuf akhlak, dan menanamkan nilai-nilai keislaman moderat yang hingga hari ini menjadi karakter dominan dalam praktik keberagamaan di Alam Melayu dan seluruh Nusantara. Melalui jaringan ini, ajaran Abdurrauf Al-Singkili tidak hanya mempengaruhi keberagamaan di Aceh tetapi juga menjadi salah satu faktor pembentuk karakter Islam Nusantara yang dikenal luas akan kedamaian, keterbukaan, dan sikap toleran.

Di Kesultanan Aceh Darussalam, Jalaluddin Tursani, salah satu murid terkemuka Abdurrauf Al-Singkili, menjadi pewaris sekaligus pelanjut utama ajarannya. Jalaluddin Tursani menulis kitab *Safinatul Hukama*, sebuah karya penting yang memuat panduan fikih yang lebih komprehensif dan mendalam. Kitab ini melengkapi *Mir'atul Tullab*, karya Abdurrauf Al-Singkili yang menjadi rujukan utama dalam pembentukan karakter beragama masyarakat Nusantara. Kedua kitab tersebut secara bersamaan membentuk dan mengatur tatanan kehidupan sehari-hari, menjadi acuan dalam praktik keagamaan, sosial, dan moral bagi masyarakat Nusantara.

Pengaruh ajaran Abdurrauf Al-Singkili begitu mendalam, bahkan sampai hari ini, khususnya di kalangan masyarakat di Aceh. Tradisi, nilai, dan praktik yang tertuang dalam ajaran Abdurrauf Al-Singkili masih sangat terasa dan dijaga dengan baik oleh masyarakat. Karya-karya beliau, yang didukung dan diteruskan oleh Jalaluddin Tursani, Baba Daud Rumi, Burhanuddin Ulakan, Abdul Muhyi, Abdul Malik Trengganu, dan lainnya, membentuk ruang keagamaan yang khas di Nusantara, mengakar dalam pola pikir dan kehidupan sehari-hari mereka. Bagi masyarakat, ajaran ini tidak hanya sebagai pedoman ibadah tetapi juga sebagai landasan etika dan moral yang mengatur berbagai aspek kehidupan.

Di samping itu, murid Abdurrauf Al-Singkili lainnya, Baba Daud Rumi mendirikan lembaga pendidikan Islam di Dayah Leupeu di Peunayong, Kutaraja. Murid-muridnya berasal dari berbagai kawasan. Di antaranya adalah pendiri lembaga pendidikan Dayah Tanoh Abee, Syekh Nayan al-Fairusi. Dayah Tanoh Abee memiliki koleksi kitab-kitab keislaman klasik mulai dari abad keenam belas hingga abad kesembilan belas. Sistem pendidikan Dayah Tanoh Abee kemudian melahirkan banyak ulama yang menyebarkan agama melalui dayah-dayah yang didirikan di berbagai daerah di Aceh. Di antara kitab rujukan dasar ilmu keislaman yang digunakan pada dayah-dayah adalah *Masailal Muhtadi*

yang dikarang Baba Daud Rumi. Biasanya waktu kitab itu disebut Kitab Masailai. Dari kitab itu, jelas bahwa untuk mampu menulis pengantar sederhana yang mudah dipahami semua kalangan, dibutuhkan kedalaman dan keluasan ilmu untuk bidang tersebut.

Peletakan dasar keilmuan oleh orang-orang berkompeten itu sangat penting. Sebab itulah pada masa kemudian, sebagian Guru Besar kajian Islam dalam berbagai bidang, selain menjadi intelektual publik dan mengajar pada Pascasarjana, juga mengajar mata kuliah pengantar untuk mahasiswa semester satu atau semester dua jenjang sarjana. Sama seperti Kitab Masailai yang sederhana itu—ditulis oleh ulama besar, pimpinan lembaga pendidikan besar di Peunayong, dan orang yang telah menjadi pendamping setia Syaikh Abdurraul Al-Singkili dalam menulis tafsir pertama dalam bahasa Melayu (dialek Melayu Pasai), *Tarjuman Al-Mustafid*.¹⁴

Masuknya Penjajahan Belanda

Narasi umum menceritakan bahwa Aceh pada abad kesembilan belas diusahakan oleh Belanda untuk dijajah. Dan orang Aceh hingga hari ini mengaku Aceh tidak kalah. Namun apabila banyak membaca sejarah dengan menggunakan banyak referensi, kesan yang muncul akan berbeda. Akan hadir sisi lain yang lebih terang dalam memahami fakta sejarah. Sebenarnya di Aceh, tidak banyak penguasa di berbagai daerah yang benar-benar tunduk pada keinginan Sultan di Kutaraja. Dalam sejarah, hanya Sultan Ali Riayat Syah dan Iskandar Muda Mahkota Alam yang benar-benar ditakuti. Setelah itu, penguasa-penguasa daerah yang disebut *lueebalang* berniaga secara independen dengan berbagai kapal asing. Setidaknya hanya wilayah Aceh Besar yang punya koordinasi solid dengan kesultanan.

Kesultanan, pasca Iskandar Muda Mahkota Alam, juga sebenarnya tidak terlalu mempedulikan negeri-negeri di luar Aceh Besar. Namun pada abad kesembilan belas, permintaan lada di Eropa meningkat. Hal ini menyebabkan *uleebalang* di berbagai kawasan menjadi kaya raya. Sementara sultan melihat, banyaknya *uleebalang* yang semacam tidak bersedia untuk tunduk, dirasa perlu untuk disikapi. Pihak kesultanan masih meyakini bahwa wilayah kekuasaannya masih melingkupi wilayah-wilayah yang pernah ditaklukkan Iskandar Muda. Kejadiannya adalah Belanda bebas berdagang dengan para *uleebalang* di berbagai wilayah. Para *uleebalang* merasa, berdagang langsung seperti itu memberi keuntungan dibandingkan harus melalui kesultanan.

Banyak *uleebalang* dan saudagar merasa risih dengan hasrat kesultanan untuk menguasai perdagangan. Mereka berusaha agar kesultanan dapat semakin dilemahkan. Salah satu strategi yang berhasil dilakukan yakni usaha Sayyid Hussain menurunkan Sultan Alauddin Jauhar Alamsyah yang telah berkuasa tiga setengah dekade dengan menobatkan putranya, Sultan Saif Al-Alam sebagai sultan. Usaha ini berhasil akibat dukungan para saudagar dan *uleebalang* yang tidak ingin bisnis mereka dengan Belanda.

Setelah periode itu, Sultan Mansur Syah naik tahta dan melakukan ekspedisi ke Langkat dan Deli. Sultan ingin memastikan bahwa para penguasa daerah mulai dari Pidie hingga Deli tunduk pada kesultanan dan rutin membayar atau transaksi perdagangan terpusat untuk dikuasai Kutaraja. Pihak Belanda sendiri sudah sangat nyaman bertransaksi dengan kawasan pantai utara Sumatra. Lagipula, Belanda merasa sangat leluasa

¹⁴ Muhammad Amin, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Mufassir Aceh: Studi Komparatif Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya Abdurraul as-Singkili Dengan Tafsir an-Nur Karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy” (PTIQ, 2022).

berdagang di kawasan pantau utara Sumatera setelah melakukan Perjanjian London pada 1924.

Isi Perjanjian London adalah izin Inggris pada Belanda untuk bebas menguasai Sumatera dan Jawa, sementara Inggris bebas menguasai Semenanjung Malaya termasuk Singapura. Aceh Darussalam sebagai negeri berkedaulatan tidak boleh diusik. Dalam hal ini, Aceh Darussalam sendiri wilayah kekuasaannya tidak jelas. Ditambah, uleebalang dan saudagar, kucing-kucingan dengan kesultanan dalam bertransaksi dagang dengan Malaka, Penang, dan bahkan Belanda. Sehingga alternatifnya adalah transaksi dagang umumnya dilakukan melalui Pulau Kampai di Langkat. Status Langkat inilah yang menjadi dilematik. Pada satu sisi, Belanda bebas berdagang dengan Siak. Sementara pihak kesultanan meyakini, Langkat hingga Deli berada di bawah kekuasaannya. Kesultanan yang geram dengan transaksi dagang Belanda di Pulau Kampai, membakar banyak kapal dagang Belanda.

Konstansi perdagangan dunia juga mengalami perubahan. Dibukanya Terusan Suez menyebabkan permintaan rempah meningkat di Eropa. Belanda sebagai salah satu importir ke Eropa memiliki kebutuhan yang meningkat. Aceh sebagai salah satu daerah yang menghasilkan banyak lada dan rempah lainnya adalah sasaran dagang yang menjanjikan. Tetapi hubungan dengan Aceh Darussalam dengan Belanda tidak baik. Belanda memilih jalur alternatif yakni berdagang langsung dengan saudagar setempat dan uleebalang. Akibatnya, kapal-kapal mereka dibakar pihak kesultanan. Pembakaran kapal-kapal Belanda juga sebenarnya merupakan imbas kompleks. Kapal-kapal Belanda juga diklaim kerap mengganggu pelayaran kapal nelayan Tamiang dan Langkat yang hendak bertransaksi perikanan ke Malaya. Namun pihak Belanda mengklaim bahwa kapal-kapal ikan itu tidak hanya berdagang, tapi juga melakukan transaksi pembelian senjata untuk memperkuat benteng Pulau Kampai. Bahkan seperti uleebalang Simpang Ulim misalnya, membeli kapal yang dilengkapi meriam.

Pertahanan Pulau Kampai sangat penting bagi Aceh Darussalam yang telah terlibat konflik dengan sejak kasus kapal *Dolphijn* pada 1836. Kapal itu mengalami sengketa di laut. Kemudian dibawa kepada Syahbandar di Pidie. Ketika Belanda hendak mengambil Kapal *Dolphijn*, kabarnya telah dibakar. Belanda melakukan balasan dengan menaklukkan Barus yang berada di bawah Kesultanan Aceh Darussalam. Bahkan sebelumnya Belanda telah bertindak semena-mena di Nias. Kemudian dibuat diplomasi antara Kesultanan Aceh dan Belanda. Belanda bebas bertransaksi di Barus. Itu sangat menguntungkan karena banyak komoditas di pantai barat selatan dipusatkan di Pelabuhan Barus. Tapi Selat Malaka lebih menjanjikan. Pantau utara timur juga punya komoditas besar. Sebab itulah Langkat terus diusahakan Belanda untuk dikuasai.

Dengan statusnya yang dilematik, Langkat sendiri tentunya mencari jalan damai agar warganya dapat berdagang dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan nyaman. Langkat rajin membayar ke Siak. Dalam hal ini, Belanda yakin bahwa Langkat di bawah Siak. Sehingga tidak masalah berdagang di Pulau Kampai. Meskipun awalnya kesultanan berhasil menguasai Langkat dan Deli, namun mereka harus angkat kaki karena banyak pihak, terutama uleebalang di Aceh, para saudagar, dan masyarakat, lebih cenderung bertransaksi langsung dengan Penang, Malaka, bahkan Belanda. Kemudian Perjanjian Sumatera dibuat pada 1971 dengan kesepakatan pelonggaran dagang Inggris di Siak dan kebebasan Belanda menguasai seluruh Sumatera. Perjanjian inilah yang membuat Belanda

dapat menyerang Kesultanan Aceh Darussalam. Itu dilakukan pada 1873 dengan mendaratkan pasukan di Kutaraja.

Serangan pertama yang dipimpin Kohler mampu ditepis. Namun pada serangan berikutnya yang dipimpin Van Sweiten berhasil menduduki istana. Selanjutnya serangan demi serangan terus dilakukan. Belanda semakin memperluas kekuasaannya. Dengan menguasai Kutaraja dan orang-orang istana yang telah melarikan diri, sebenarnya misi Belanda sudah tercapai. Dengan begitu perdagangan Belanda menjadi lancar. Itulah yang mereka inginkan. Kesultanan Aceh darussalam memang dari awal sudah melemah.

Posisi kesultanan yang melemah, membuat Belanda berhasil melancarkan serangannya. Pada masa serangan itu, Sultan Alauddin Mahmud Syah dilantik menjadi sultan pada usia belia. Sehingga kepemimpinan kesultanan dilaksanakan oleh Habib Abdurrahman Az-Zahir. Petinggi lainnya dalam kesultanan adalah Panglima Tibang. Menjelang perang, Habib Abdurrahman Az-Zahir rajin turun ke berbagai daerah kekuasaan untuk mengumpulkan pajak. Semangat itu dilakukan karena dia sudah menduga, cepat atau lambat, Belanda akan menyerang Aceh. Sehingga perlu mengumpulkan banyak bekal untuk mempersiapkan perlengkapan perang.

Setahun sebelum meletusnya perang, Habib Abdurrahman Az-Zahir berangkat ke Turki untuk mencari bantuan. Usaha itu tidak mudah. Turki sedang menghadapi banyak masalah. Setelah Belanda menguasai Kutaraja, pulang dari Turki, Habib Abdurrahman Az-Zahir singgah di berbagai tempat. Kemudian Habib Abdurrahman Az-Zahir ke Malaysia untuk mengumpulkan banyak perlengkapan perang yang sangat banyak dan dikirim untuk perjuangan Aceh melawan Belanda.

Sebelum perang, Panglima Tibang juga sudah berangkat ke Riau dan Singapura untuk mencari dukungan dari Amerika Serikat, Italia, dan lainnya terkait kemungkinan Belanda menyerang Aceh. Diplomasi itu sebenarnya berhasil membuat Amerika Serikat bertindak. Mereka akan menyiapkan dua kapal perang di Selat Malaka untuk mencegah kemungkinan serangan Belanda. Tetapi kabar ini dibocorkan kepada Belanda oleh anggota delegasi Panglima Tibang sendiri, Muhammad Arifin. Mengetahui hal tersebut, Belanda menyegerakan langkahnya menyerang Aceh.

Perang meluas ke luar Aceh Besar. Sebagian uleebalang malah terus berdagang dengan Belanda. Hal ini membuat para ulama bangkit dan menyuarakan perang syahit kepada masyarakat. Dalam situasi perang itulah, sebagai bentuk komunikasi, termasuk narasi-narasi seruan jihad menggunakan bahasa Aceh yang merupakan rumpun bahasa Chamik yang sebelumnya telah digunakan di pedalaman Aceh besar. Bahasa tersebut efektif sebagai komunikasi rahasia agar tidak diketahui pihak Belanda yang lebih memahami bahasa Melayu. Bahasa Aceh juga mulai digunakan dalam lembaga-lembaga pendidikan karena itu juga merupakan ranah yang sangat diwaspadai Belanda. Karena waktu itu pendidikan dayah berkembang dari Aceh Besar, perkembangan bahasa Aceh menjadi cepat dan masif ke seluruh Aceh. Baik sebagai bahasa pengembangan ilmu pengetahuan, maupun bahasa sehari-hari karena bahasa itu sulit dipahami pihak Belanda. Pihak belanda sendiri sangat ini menguasai bahasa Aceh. Sebab itulah, ketika Teuku Nyak Arif membuka lembaga pendidikan di Kutaraja, dia menolak menjadikan bahasa Aceh sebagai bahasa pengantar. Salah satu alasannya adalah, agar Belanda dan pendukungnya di Kutaraja tidak dengan mudah dan cepat menguasai bahasa Aceh. Itu akan sangat merugikan para pejuang. Adapun Tuanku Raja Keumala dan para pengusung lembaga

pendidikan Islam modern lainnya di Aceh, lebih memilih untuk mempertahankan bahasa Melayu karena itu juga dapat menjadi bekal keterhubungan Aceh dengan negeri-negeri lainnya di Nusantara.

Kesimpulan

Kesultanan Aceh Darussalam memiliki peran signifikan dalam sejarah Nusantara sebagai pusat perdagangan, penyebaran Islam, dan kebudayaan. Berawal dari transformasi Kerajaan Lamuri, kesultanan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Iskandar Muda (1607–1636), yang memperluas wilayah hingga ke Semenanjung Malaya dan membangun hubungan diplomatik dengan kekuatan-kekuatan dunia seperti Inggris, Belanda, dan Prancis. Selain itu, Aceh berkembang menjadi pusat kosmopolitan yang mengintegrasikan perdagangan internasional, kekayaan budaya, dan pendidikan Islam. Peran tasawuf filosofis yang diajarkan oleh ulama seperti Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Al-Sumatrani menjadikan Aceh sebagai pusat intelektual Islam. Namun, pendekatan ini mengalami penolakan pada masa Sultan Iskandar Tsani dengan munculnya pemikiran konservatif yang dipelopori oleh Nuruddin Ar-Raniri. Pergeseran ini mengakibatkan penekanan pada syariat Islam yang lebih ketat dan terbatasnya ruang bagi pemikiran tasawuf falsafi. Di sisi lain, Abdurrauf Al-Singkili menjadi tokoh yang dianggap berhasil mewujudkan Islam jalan tengah. Hal ini memperkuat identitas keislaman Aceh dan memengaruhi pola keberagamaan di Nusantara. Kemunduran Kesultanan Aceh Darussalam terjadi akibat konflik internal, dominasi saudagar, dan serangan kolonial Belanda pada abad kesembilan belas. Namun, warisan intelektual dan keagamaannya tetap lestari, menjadikan Aceh simbol kebesaran Islam di Nusantara dan teladan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, spiritualitas, serta semangat perlawanan terhadap penjajahan.

Daftar Pustaka

- Amin, Muhammad. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Mufassir Aceh: Studi Komparatif Tafsir Terjemahan Al-Mustafid Karya Abdurrauf as-Singkili Dengan Tafsiran-Nur Karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.” PTIQ, 2022.
- Azra, Azyumardi. *The Origins of Islamic Reformism In Southeast Asia*. Honolulu: Allen & Unwin and University of Hawai’i Press, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Penilaian Teologis Atas Paham Wahdatul Wujud Dalam Tasawuf Syamsuddin Sumatrani*. Padang: IAIN Imam Bonjol Press, 1992.
- Fathurahman, Oman. *Ithaf Al-Dhaki: Tafsir Wahdatul Wujud Bagi Muslim Nusantara*. Bandung: Mizan, 2012.
- . *Tanbih Al-Masyi: Menyual Wahdatul Wujud: Kasus Abdurrauf Singkel Di Aceh Abad 17*. Bandung: Mizan, 1999.
- Harun, Jelani. “Bustan Al-Salatin , ‘the Garden of Kings’: A Universal History and ADAB Work from Seventeenth-century ACEH.” *Indonesia and the Malay World* 32, no. 92 (March 2004): 21–52.
- Lombard, Denys. *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- Miswari. “Gagasan Nuruddin Ar-Raniri Dalam ‘Tibyan Fi Ma’Rifah Al-Adyan.’” *At-Tafkir* 11, no. 1 (October 20, 2018): 31.

- <http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/527>.
- Nasution, Ismail Fahmi Arrauf. "Termination of Wahdatul Wujud In Islamic Civilization In Aceh: Critical Analysis of Ithaf Ad-Dhaki, The Works of Ibrahim Kurani." *ADDIN* 11, no. 2 (August 1, 2017): 401.
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/view/3356>.
- Neubie Phonna, Cut Natari. "Fungsi Ruang Kerajaan Peureulak." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 6 (June 16, 2023): 1027–1039.
<https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/236>.
- Said, Mohammad. *Aceh Sepanjang Abad Vol. I*. Medan: Waspada, n.d.
- Soelaiman, Darwis A. "Aceh Dalam Konteks Dunia Melayu." In *Warisan Budaya Melayu-Aceh*, 114. Banda Aceh: PUSMA, 2003.
- Sudirman. *PEMANFAATAN PENINGGALAN SEJARAH KERAJAAN LAMURI SEBAGAI MUSEUM SITUS*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Aceh, 2022.